

**PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU PENCURIAN SEBAGAI
KORBAN KEKERASAN BERSAMA-SAMA OLEH MASYARAKAT
DI KABUPATEN GOWA**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Ilmu Hukum
pada Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RAHMAT ROOFI J.

NIM: 10500113075

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan dibawah ini :

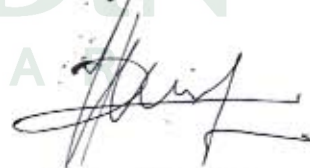
Nama : Rahmat Roofi J.
Nim : 10500113075
Tempat/Tgl. Lahir : Makassar, 31 Desember 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Alamat : Perumahan Bumi Pallangga Mas II Blok E No. 10
Judul : Perlindungan Hukum Pelaku Pencurian Sebagai Korban Kekerasan Bersama-Sama Oleh Masyarakat Di Kabupaten Gowa

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 28 Juni 2018
Penyusun,



Rahmat Roofi J.
NIM. 10500113075

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Pelaku Pencurian Sebagai Korban Kekerasan Bersama-Sama Oleh Masyarakat di Kabupaten Gowa**”, yang disusun oleh saudara **Rahmat Roofi J**, NIM: **10500113075**, mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertanggungjawabkan pada sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar dengan beberapa perbaikan.

Samata, 28 Juni 2018

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Rahman Syamsuddin, S.H, M.H.	(.....)
Munaqasyah I	: Dr. Hamsir, M.Hum.	(.....)
Munaqasyah II	: St. Nurjannah, S.H, M.H.	(.....)
Pembimbing I	: Dr.Andi Safriani, S.H, M.H.	(.....)
Pembimbing II	: Dr. Fadli Andi Natsif, SH., MH	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag.
NIP. 19621016 199003 1 003

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, dikarenakan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pelaku Pencurian Sebagai Korban Kekerasan Bersama-Sama Oleh Masyarakat Di Kabupaten Gowa”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar pendidikan sarjana bagi mahasiswa program S1 pada studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan.

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan dari berbagai pihak dan tentu karena berkah Allah SWT. sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi.

Ucapan terima kasih penyusun sampaikan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III.
3. Ibu Dr. Andi Safriani, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Fadli Andi NATsif, S.H.,M.H selaku pembimbing II, serta Bapak Dr. Hamsir, S.H.,M.Hum selaku penguji I dan Ibu St. Nurjannah, S.H.,M.H selaku penguji II yang telah dengan sabar, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan

pemikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penyusun selama menyusun skripsi.

4. Ibu Istiqamah, S.H.,M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Rahman Syamsuddin, S.H.,M.H selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Kapolres Gowa beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk melakukan kegiatan penelitian.
6. Satria, Alka, Callu, Rijal, Fahmi, Oji, Saddam, Takbir, Bod, Firman, Taufik, Febri, Malaba, Ipul, Fandi, Cuwa, Rais, Ika, Risa, Winda, Sulfi, beserta sahabat-sahabat lain yang tidak sempat disebutkan namanya yang telah banyak membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
7. Kakanda Alumnus Zainuddin, Kakanda Darwis M. Rewa, Kakanda Muh. Syukur, Kakanda Rachdian Rakaziwi, Kakanda Andi Firmansyah beserta senior-senior lain yang tidak sempat disebutkan namanya yang telah memberikan semangat dan motivasi untuk penyusun dalam menyelesaikan skripsi.
8. Rekan-rekan mahasiswa se-Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya di Jurusan Ilmu Hukum (Mediator 2013), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Mahasiswa Berpendidikan Hukum (MBH).

Penyusunan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penyusun, terkhusus pada kedua orang tua tercinta, yaitu Ayahanda Abd. Jabbar S.E. dan Ibunda Marwah Ilham dan juga kepada saudara kandung Achmad Suhaimin dan Dewi Sucianti Jabbar, terima kasih atas doa dan restu yang tulus yang diberikan kepada penyusun.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penyusun menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penyusun mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati penyusun menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Makassar, 29 Maret 2018

Penyusun

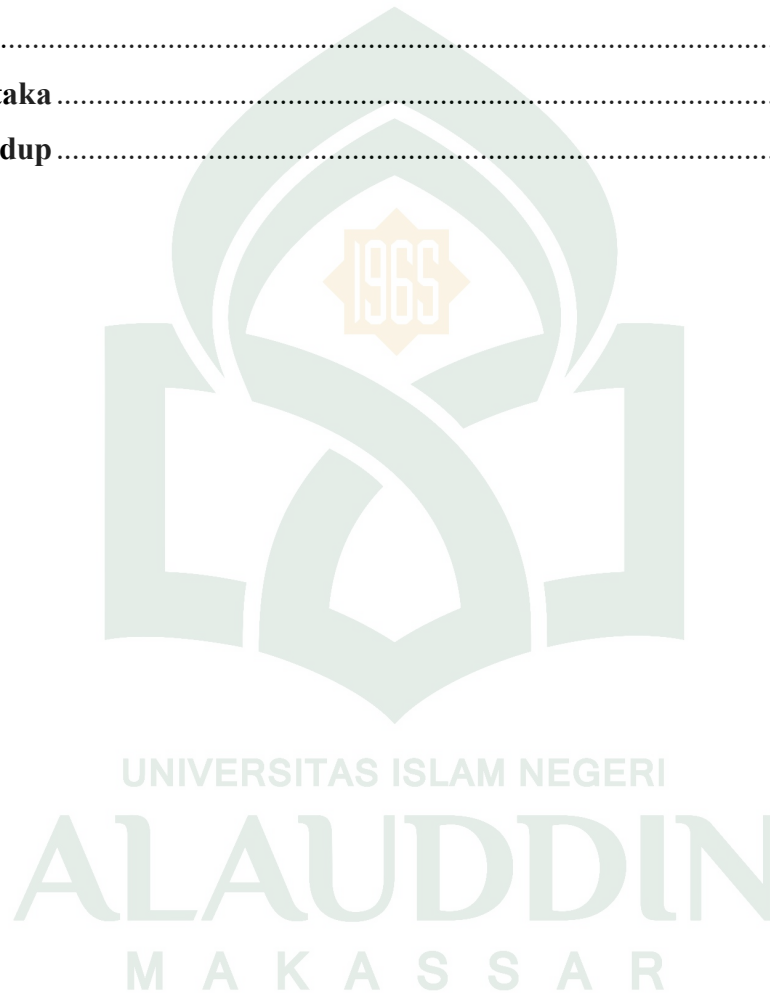
RAHMAT ROOFI J.
NIM: 10500113075



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORITIS	15
A. Pengertian Perlindungan Hukum	15
B. Pengertian Hukum Tindak Pidana	20
C. Pengertian Kejahatan dan Teori-Teori Kejahatan	24
D. Pengertian Kekerasan Bersama-Sama	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Bersama-Sama Yang Di Lakukan Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian Di Kabupaten Gowa.....	34
1. Kondisi Sosial Kemasyarakatan	35
2. Perlindungan Hukum Pelaku Pencuri Sebagai Korban	39
3. Refleksi Keberlakuan Hukum Pidana.....	42

B. Langkah-Langkah Yang Di Tempuh Oleh Penegak Hukum Dalam Menindak Pelaku	
Kekerasan Secara Bersama-sama Terhadap Pelaku Pencuri	50
1. Penegak Hukum.....	52
2. Langkah Preventif.....	55
3. Langkah Represif.....	58
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	67
Daftar Pustaka	68
Riwayat Hidup	71



ABSTRAK

Nama : Rahmat Roofi J.

NIM : 10500113075

Judul : Perlindungan Hukum Pelaku Pencurian Terhadap Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Masyarakat di Kab. Gowa

Pokok permasalahan dalam penulisan ini yaitu: 1) Apakah yang menyebabkan kekerasan bersama-sama dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ? 2) Langkah-langkah apakah yang ditempuh penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan secara bersama-sama terhadap pelaku pencurian ?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan bersifat normatif – empiris yakni mengkaji kolerasi antara kaidah hukum dalam bentuk ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kaitannya terhadap peristiwa hukum pada kasus kekerasan secara bersama-sama yang dilakukan oleh sekelompok orang di Kabupaten Gowa terhadap pelaku pencurian.

Beragam bentuk kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam bertindak. Lebih menyedihkan lagi karena dari sekian banyak kasus kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pencurian tidak pernah terungkap dengan tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekerasan merupakan suatu yang inheren pada diri manusia, sehingga manusia mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Potensi ini tidak bisa dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat dicegah agar kekerasan tidak teraktualisasi atau terminimalisasi. Oleh karenanya pandangan inheren beranggapan bahwa kekerasan pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kehendak dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sedangkan pandangan kontingensi berpendapat bahwa kekerasan merupakan hasil dari kondisi struktural yang melingkupi kehidupan manusia seperti nilai, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Sebagai perbuatan melanggar hukum, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya, pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri termasuk dalam delik biasa bukan delik aduan. Artinya, pihak kepolisian sesuai dengan kapasitasnya sebagai penyelidik atau penyidik dalam melakukan proses hukum terhadap pelakunya pada dasarnya tidak memerlukan pengaduan dari korban atau tidak harus menunggu adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu. Namun demikian, kewenangan yang ada pada polisi untuk mengawali proses hukum terhadap pelaku pengadilan jalanan ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena terkendala oleh tidak adanya yang berkenan untuk menjadi saksi. Upaya pencegahan menimbulkan kekerasan secara bersama-sama harus dilakukan untuk memberikan ketertiban hukum yang jauh lebih efektif. Namun upaya represif harus tetap dilakukan agar memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum, Indonesia menjadi negara yang tumbuh dan berkembang melalui prinsip-prinsip sosial yang telah dikodefikasi. Hal ini tentunya untuk menjamin keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sosial ditengah masyarakat. Dengan jaminan tersebut tidak semata-mata membuat tugas negara selesai, karena tentunya keamanan dan kenyamanan bisa terwujud jika setiap masyarakatnya telah mendapatkan kemakmuran. Yakni tiap-tiap kebutuhan pokok dari masyarakat mampu terpenuhi dengan baik.

Pada umumnya hukum diciptakan sebagai bentuk rekayasa sosial. Yang pada dasarnya tiap individu memiliki hukumnya masing-masing dimana mampu bertindak sesuai keinginannya. Oleh sebab itu hukum yang lahir akibat konsensus itu menjadi bentuk rekayasa sosial yang harus mampu mengontrol tiap perilaku juga perbuatan manusia agar tidak mengganggu manusia lainnya. Hukum ini memiliki sifat yang mengikat dan memaksa bagi semua orang yang dimaksud. Dimana tiap orang yang telah melanggar aturan tersebut, harus diproses sesuai ketentuan-ketentuan yang telah diatur juga. Keberlakuan hukum ini harus menjamin kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Lahirnya Undang Undang Dasar 1945 sebagai bukti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini dijelaskan dan ditegaskan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan itu segala perbuatan yang dilakukan tidak

boleh melanggar hukum yang ada. Tentu dengan alasan bahwa penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya menciptakan negara Indonesia yang damai, adil dan sejahtera. Tanpa adanya penegakan hukum dan ketertiban hukum, maka kesejahteraan masyarakat tidak mungkin akan dapat terwujud. Karena penegakan hukum dan ketertiban sangat terkait dengan profesionalitas lembaga dan orang-orang yang berada pada suatu sistem peradilan hukum di Indonesia. Ketidak mampuan aparaturnegara untuk bersifat profesional akan membuat banyak kejahatan yang akan terjadi atau perbuatan yang menentang hukum-hukum yang telah dirumuskan.

Kejahatan adalah suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Dimana dalam kehidupan masyarakat seringkali ditemukan perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum. Ini dilakukan oleh sekelompok orang ataupun individu untuk meraih keuntungan dan kepentingan mereka. Salah satu kejahatan yang kini sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana pencurian, sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman ditengah masyarakat. Ketidaknyamanan ini berkembang menjadi kekhawatiran besar untuk melakukan aktivitas baik didalam rumah maupun diluar rumah.

Tindak pidana pencurian ini adalah kejahatan yang paling sering terjadi ditengah masyarakat. Sulitnya memenuhi kebutuhan (perekonomian) pribadi dan keluarga, memungkinkan orang untuk mengambil jalan pintas dengan cara mencuri. Berdasarkan pengamatan yang ada baik secara faktual ataupun dimedia cetak dan elektronik menunjukkan fluktuasi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya yang salah satunya dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Para pelaku pencurian ini dapat melakukan aksinya dengan berbagai cara atau modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) yang berbeda-beda antara kejahatan satu dengan yang lainnya. Apalagi jika didukung oleh beberapa ketersediaan sarana dan prasarana untuk melakukan kejahatan ini. Modus operandi (cara pelaksanaan kejahatan) mengarah pada kemajuan ilmu dan teknologi. Cara-cara yang dilakukan dapat dikelompokkan misalnya pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan dan lain-lain.

Secara normatif pengaturan tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku II Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367. Batasan pengertian tentang pencurian diatur dalam Pasal 362, tentang jenis pencurian dan pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363, tentang pencurian ringan diatur dalam Pasal 364, tentang pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365, dan Pasal 367 mengatur tentang pencurian dalam keluarga. Salah satu yang memberatkan pelaku tindak pidana adalah pencurian yang disertai dengan kekerasan. Dimana faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial masyarakat.

Sebagai rakyat Indonesia tentulah diharuskan memiliki keyakinan tentang beragama sebagai landasan moral dalam bernegara. Ini telah ditegaskan didalam sila pertama pancasila, yang kita kenal sebagai falsafah negara Indonesia. Dimana Islam adalah agama yang universal yang mengatur segala bentuk perbuatan manusia. Sehingga perbuatan tindak pidana pencurian juga dijelaskan didalam Al-Qur'an yaitu:

QS. Al-Maidah ayat 38

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya : Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya, sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

Dari ayat tersebut, kita mampu mengambil hikmah yang luar biasa. Bahwa didalam agama Islam sangatlah dilarang melakukan perbuatan mencuri dan tentunya tak menerima alasan apapun. Walau banyak yang beranggapan hukuman memotong tangan sangatlah kejam tetapi alasan tersebut sangatlah lemah karena bukanlah hukuman jika masih lunak dan lemah dan bisa terlihat seperti permainan saja. Karena itu, sifat keras dan pedih ini haruslah tercermin pada yang namanya hukuman.

Namun dilain sisi banyak ditemukan beberapa hal yang membuat terjadinya kesenjangan didalam penegakan hukum. Seringnya terjadi seorang pencuri yang tertangkap oleh warga mampu menyulut kemarahan yang luar biasa dari masyarakat. Akhirnya kemarahan yang tidak bisa lagi dibendung dan berujung pada kekerasan. Dimana dalam perspektif ini masyarakat yang ikut melakukan kekerasan tersebut ingin memberikan efek jera kepada pelaku pencuri justru melakukan pelanggaran juga.

QS. An-Nisaa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.

QS. An-Nisaa ayat 105

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Artinya: Sesungguhnya kami Telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), Karena (membela) orang-orang yang khianat.

Dari dua ayat diatas telah mengemukakan tentang bagaimana kita harus menegakkan keadilan. Dimanapun dan kapanpun keadilan harus menjadi tujuan utama. Kekerasan bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat kepada pelaku pencuri adalah bentuk pelanggaran. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Dimana unsur-unsur

yang dimiliki oleh pasal ini, tidak dibenarkan jika masyarakat melakukan perbuatan kekerasan kepada siapapun.

Dalam hal kekerasan bersama-sama, perbuatan ini juga bisa dikatakan dengan perbuatan main hakim sendiri (*eigen righting*). Dimana perbuatan main hakim sendiri tersebut yang selama ini terjadi, dilihat dari akibatnya. Bahwa orang yang diduga sebagai pelaku pencurian telah menjadi “korban” kekerasan bersama-sama yang pada umumnya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan dan tidak jarang juga ada yang menyebabkan kematian serta rusaknya barang yang dimiliki orang yang diduga pelaku tindak pidana pencurian.

Belakangan ini pandangan tradisional diatas dipertanyakan. Salah satu penyebabnya adalah semakin ditekankannya pendekatan historis dalam mengkaji hal ikhwal manusia. Pendekatan sejarah diperkuat, terutama di Amerika Serikat, dengan penelitian-penelitian dibidang antropologi budaya. Penelitian tentang manusia primitif telah menemukan sedemikian banyak adat, norma-norma, perasaan dan pemikiran hingga banyak antropologi yang membuat konsep bahwa manusia terlahir bagaikan secarik kertas putih bersih yang didalamnya kemudian ditulisi naskah-naskah budaya. Faktor lain yang menyebabkan kecenderungan untuk menyangkal asumsi tentang fitrah manusia yang sudah baku adalah konsep yang kerap kali disalahgunakan sebagai dalih untuk memaklumi tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Sebagai misal dengan mengatasnamakan manusia, Aristoteles dan sebagian besar pemikir hingga abad ke-18 melanggengkan perbudakan. Atau untuk membuktikan betapa rasionalnya dan betapa perlunya, bentuk kapitalisme masyarakat, banyak ilmuwan yang membuat alasan bahwa ketamakan atau

kerakusan, persaingan dan egoisme merupakan ciri bawaan manusia. Pada umumnya orang merujuk secara klinis, kepada “fitrah manusia” dalam memaklumi perilaku buruk yang tak terhindarkan semisal kerakusan, pembunuhan, penipuan dan pendustaan.¹

Seperti tragedi yang baru-baru saja terjadi dimuat dalam *kompas.com* sejumlah massa yang berada di kampung Muara Bakti, Desa Muara Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi membakar pelaku MA dengan hidup-hidup yang diduga mencuri amplifier mushollah (1 agustus 2017). Dan dalam kasus yang lain seorang terduga pelaku pencuri kendaraan bermotor meregang nyawa setelah dihakimi massa di kampung Cicalobak, Desa Mekarwangi, Kecamatan Mekarmukti, Garut (20 September 2017)

Adanya asas *equility before the law* (persamaan dihadapan hukum) membuat pencuri memiliki hak untuk tidak dianiaya ketika sudah tertangkap. Dengan pelanggaran yang telah dilakukan seorang pencuri tidak berarti dibenarkan untuk melakukan kekerasan padanya. Apalagi dengan sengaja mengajak orang lain untuk ikut serta melakukan kekerasan secara bersama-sama kepada pelaku pencuri. Walaupun pembahasan ini terdengar kontroversi karena seakan-akan membela pelaku pencuri, tetapi sebenarnya kekerasan bersama-sama yang dilakukan masyarakat juga adalah hal yang salah dan dapat dipidanakan. Oleh karena itu, pencerdasan masyarakat terhadap hukum menjadi penting. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga niat baik masyarakat yang ingin memberikan efek jerah kepada pelaku pencuri tetapi dengan perbuatan kekerasan tersebut bisa menjerat dirinya untuk dipenjarakan.

¹ Erich Fromm, “*Akar Kekerasan-Analisis Sosio-psikologi atas Watak Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 311

Timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda material terbatas, sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Sudah menjadi kodrat alamiah, apabila kebutuhan satu telah terpenuhi, maka kebutuhan selanjutnya akan segera timbul, begitu seterusnya tanpa henti. Dengan demikian manusia berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara, tidak mustahil dalam memenuhi kebutuhan itu dengan cara-cara melanggar hukum. Begitu juga harta benda dapat menyebabkan terjadinya kejahatan lainnya seperti penipuan, penggelapan dan bahkan pembunuhan.

Dalam kasus pembunuhan, penganiayaan maupun kejahatan lain yang ditujukan terhadap nyawa maupun tubuh manusia disebabkan karena emosi yang tak terkendalikan, tak menghargai hidup orang lain, sikap mau menang sendiri, kerasnya persaingan hidup, iklim kompetisi yang tidak sehat atau *fair* sebagai penyebab terjadinya kejahatan.

Kejahatan menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan karena faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak dimasyarakat itu. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, kejahatan disebabkan karena kemakmuran. Kejahatan korupsi misalnya, merupakan contoh dari pernyataan ini. Korupsi marak bukan karena pelakunya miskin mereka pada umumnya secara ekonomi telah mapan tetapi kesempatan dan kebutuhan mendesak pelaku melakukan hal itu.²

² M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2016), hal..2

Dan yang menjadi fundamental dalam pola pikir ini adalah fungsi hukum dalam melindungi juga menciptakan keadilan. Pengkajian bekerjanya suatu hukum sebagai proses sosial adalah adanya sikap dan nilai-nilai yang tertanam pada masyarakat dan penegak hukum kedalam peradilan pidana itu sendiri.

Pencerdasan hukum bagi masyarakat masih sangat minim dilakukan oleh kalangan pemerintahan dan juga Kepolisian RI. Hingga membuat fenomena kekerasan bersama-sama yang dilakukan masyarakat masih sering ditemui di beberapa daerah terkhusus Kabupaten Gowa. Tentunya hal tersebut membutuhkan kajian khusus agar hal tersebut tidak terjadi lagi demi mewujudkan sejatinya hukum yang berkeadilan sosial. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis ingin membahas secara mendalam terkait kekerasan bersama-sama yang masih sering dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Gowa dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Perlindungan Hukum Pelaku Pencurian Sebagai Korban Kekerasan Bersama-Sama Oleh Masyarakat di Kabupaten Gowa.”**

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus dalam penelitian ini adalah perbuatan kekerasan bersama-sama yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pencurian. Karena hal ini dianggap benar oleh sebagian masyarakat di beberapa daerah tidak terkecuali di Kabupaten Gowa. Kekerasan bersama-sama ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Juga berkaitan dengan hak-hak yang dimiliki bagi setiap orang dihadapan hukum haruslah sama.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat ditarik pokok permasalahan tentang bagaimana analisis yuridis terhadap perbuatan kekerasan bersama-sama yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Gowa. Dari hal tersebut lahirlah beberapa rumusan masalah yang menjadi inti pembahasan skripsi ini, antara lain:

1. Apakah yang menyebabkan kekerasan bersama-sama dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian ?
2. Langkah-langkah apakah yang ditempuh oleh penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan secara bersama-sama terhadap pelaku pencurian ?

D. Kajian Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber juga rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melalui perenungan panjang dari masalah-masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dan beberapa karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah tersebut. Adapun beberapa referensi yang memiliki relevansi dengan judul penulis, sebagai berikut:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materil di Indonesia.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai proses penanganan perbuatan pidana yang dimulai dari penyidikan hingga putusan hakim di pengadilan. Dan beberapa upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan bagi seorang tersangka dan atau terdakwa dalam mencari keadilan.

Fathul Achmadi Abby dalam bukunya “Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal” yang menjelaskan bahwa beragam bentuk kekerasan yang selama ini terjadi oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengesampingkan hukum yang seharusnya menjadi *principle guiding* (bimbingan prinsip).

C. Maya Indah S. dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Korban Suatu Perspektif dan Kriminologi” yang menjelaskan tentang beberapa pembagian tipe yang dimaksud sebagai korban. Dan yang menjadi titik fokus adalah keberhasilan hukum menjamin keamanan korban dalam pengawalan kasus hingga selesai. Buku ini mengidentifikasi dan mengeksplorasi perlindungan hukum terhadap korban atas bekerjanya lembaga dan pranata hukum dalam peradilan pidana.

Tolib Effendi dalam bukunya yang berjudul “Dasar-Dasar Kriminologi: Ilmu tentang Sebab-Sebab Kejahatan” yang menjelaskan tentang beberapa faktor yang mendorong terjadinya perbuatan pidana. Juga analisis reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang terjadi disekitar mereka.

M. Ali Zaidan dalam bukunya yang berjudul “Kebijakan Kriminal” yang menjelaskan tentang kejahatan secara komprehensif, teori-teori kriminologi, pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Yang memandang hukum harus dinamis menyikapi perbuatan kejahatan dan aturannya.

Yesmil Anwar dan Adang dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Sosiologi Hukum” yang menjelaskan tentang sifat dan sikap suatu masyarakat dalam menyikapi hukum juga dalam membuat hukum. Karakteristik masyarakat sangat

mampu merubah kekuatan hukum yang sifatnya memaksa apabila bertentangan dengan keyakinan mayoritas masyarakat dari kebenaran suatu hukum dalam membawanya pada kebaikan ditatanan bermasyarakat.

Fernando M. Manullang dalam bukunya yang berjudul “Menggapai Hukum Berkeadilan” yang menjelaskan kekuatan hukum yang ada pada tiap diri seseorang yang mampu menghilangkan keberadaan hukum positif yang telah diatur sebelumnya. Dengan pembahasan yang spesifik mengenai hakikat suatu hukum tidak ditentukan secara formal karena potensi yang sangat besar untuk terjadinya turbolensi hukum yang masing-masing menuntut keberlakuannya.

Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya yang berjudul “Rekayasa Sosial” yang menjelaskan tentang kerancuan berpikir dan mitos-mitos yang terjadi ditengah masyarakat dengan mengedapankan aspek-aspek perubahan yang terjadi atas ketidaksesuaian antara *dassein* (kenyataan) dan *dassollen* (harapan).

Nezar Patria dan Andi Arief dalam bukunya yang berjudul “Negara dan Hegemoni” yang menjelaskan tentang konsep-konsep keberadaan dan tujuan sebuah negara. Yang tentunya tidak semata-mata hanya untuk kekuasaan, tetapi dengan menjamin hak-hak setiap orang yang tergabung dalam negara tersebut.

Syaiful Bakhri dalam bukunya yang berjudul “Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana” yang menjelaskan tentang hukum pidana dengan sistem peradilan Indonesia, juga prinsip-prinsip ideal dalam meningkatkan pelayanan publik terkhusus pihak Kepolisian. Dan hukum yang saling mempengaruhi dengan disiplin ilmu-ilmu sosial, sehingga perkembangan ilmu lainnya mampu memberikan sumbangan terhadap sifat yang egosentrik dari ilmu hukum pidana khususnya.

Russel Butarbutar dalam bukunya yang berjudul “Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat” yang menjelaskan tentang pengertian-pengertian tindak pidana dan kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

Imam Suroso dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana *Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya*” yang menjelaskan tentang karakteristik penghentian penyidikan oleh penyidik Polri. Juga kewenangan penegak hukum dan fungsi dalam penegakan hukum yang kian melemah.

E. Sundari dalam bukunya yang berjudul *Praktik Class Action di Indonesia*” yang membahas tentang upaya dan wewenang yang dilakukan sebuah lembaga negara dalam penegakan hukum dengan mengedepankan hak-hak dari korban yang merasa dirugikan.

Jacobus Ranjabar dalam bukunya yang berjudul “Perubahan Sosial *Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan*” yang menjelaskan tentang alasan-alasan dari perubahan sosial yang terjadi dimasyarakat dengan mencari benang merah dari beberapa pendapat para tokoh sosial yang ada.

Zainal Arifin Hoesein dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Dinamika Sosial” yang menjelaskan tentang hukum dan perubahan sosial sebagai dasar terciptanya sebuah tatanan hukum yang mampu menjamin ketentraman yang ada ditengah masyarakat atas dasar hukum yang tercipta dari kultur mampu menjamin ketertiban.

Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2” yang menjelaskan tentang beberapa penafsiran dalam hukum pidana dari berbagai aspek juga dasar-dasar yang menyebabkan seseorang dapat dipidanakan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menjelaskan tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kekerasan bersama-sama dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku tindak pidana pencurian.
- b. Menjelaskan tentang langkah-langkah apakah yang ditempuh oleh penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan terhadap pelaku tindak pidana pencurian.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian ini tercapai, adapun kegunaan dari hasil penelitian tersebut adalah :

- a. Diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan juga aktivitas sosial untuk masyarakat yang sadar akan hukum.
- b. Hasil penelitian yang dirangkum dalam bentuk skripsi ini diharapkan mampu memberi informasi atau sebagai bahan literatur dalam penegakan hukum di Indonesia.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan hak hak kemanusiaan yang dibagi rata bagi tiap individunya yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Perlindungan hukum merupakan wujud dari berjalannya fungsi hukum melalui pranatanya. Dalam kerangka kontruksi sosial, maka keberadaan dan respons korban terhadap realitas kejahatan/peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan sesuatu pengkontruksian terhadap realitas kejahatan/proses penimbunan korban dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi didalamnya, serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas. Dengan demikian, realitas sosial terhadap perlindungan korban dalam masyarakat melalui peradilan pidana dikonstruksikan oleh formulasi maupun bekerjanya perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.³

³ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, (Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2014), hal.51

Dalam upaya melindungi setiap orang dari yang namanya kejahatan, mendefinisikan kejahatan dalam berbagai sudut pandang adalah hal yang sangat mendasar untuk dilakukan. Dimana dari sudut pandang hukum, kejahatan merupakan setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang juga diatur dalam hukum pidana. Kemudian dari sudut pandang sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban didalam bermasyarakat.

Bhom dan Haley lebih sederhana dalam menterjemahkan perihal kejahatan. Kejahatan dapat ditinjau dari dua macam pengertian, pengertian sosial dan pengertian hukum. Didalam pengertian sosial, kejahatan adalah perilaku yang melanggar norma-norma sosial, atau lebih sederhananya dapat dikatakan sebagai perilaku anti sosial. Sedangkan dalam pengertian hukum, kejahatan diartikan sebagai pelanggaran yang ditujukan kepada aturan hukum atau hukum pidana, dilakukan tanpa hak atau ijin dan dijatuhi hukuman oleh negara.⁴

Didalam mempelajari tentang kejahatan, kriminologi membedakan antara kejahatan dan tindak pidana karena ruang lingkup dari objek kajian kriminologi adalah kejahatan bukan tindak pidana, sehingga perlu dibedakan antara kejahatan dan tindak pidana. Kriteria pembeda yang paling tepat untuk membedakan diantara

⁴ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Kriminologi "Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan"*, (Malang: Setara Press, 2017), hal. 6

keduanya adalah sebagaimana pendapat Bohm dan Haley tersebut. Akan tetapi apa kriteria untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan kejahatan yang belum menemukan titik temu karena satu perbuatan disatu masyarakat terkadang dimaknai lain dalam masyarakat lainnya.

Tetapi perbedaan dalam penerapan hukum menjadi salah satu masalah yang kita hadapi saat ini. Karakteristik korban dari *white collar crime* dinyatakan Sutherland sebagai kelemahan dari korban itu sendiri/*weakness of their victims*. Korban ini bersifat tidak terorganisasi, kekurangan pengetahuan teknis dan tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Perbedaan dari kekuatan korban kejahatan dari kelas bawah dibandingkan dengan *white collar crime* ialah pada pelaku kejahatan *white collar crime* relatif menikmati kekebalan terhadap penuntutan.⁵

Selaras dengan hal fungsi pengayoman dalam bekerjanya sistem peradilan pidana, kepentingan umum dan kepentingan individu (baik korban maupun pelaku), perlu dikemukakan karakteristik aliran-aliran dalam hukum pidana. Aliran dalam hukum pidana meliputi:

1. Aliran klasik dengan pelbagai ciri (al. *Doctrinee of free will, punishment should be fit the crime, legal definition of crime determinate sentence, daderstrafrecht, no empirical research, justice model, equal justice*, pidana bersifat pembalasan) menunjukkan kelemahan, yakni tidak memperhitungkan harkat dan martabat manusia terlalu mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum.

⁵ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, hal.33

2. Aliran modern dengan senjata ilmu pengetahuan dengan pelbagai karakteristiknya (*natural crime indeterminate sentence, doctrine of determination, punishment should be fit the crime, judicial discretion, daderstrafrecht, medical model, individualization of punishment and treatment* dan saksi bersifat mendidik) menunjukkan kelemahan, yakni terlalu memanjakan penjahat dan apabila diterapkan sungguh-sungguh terlalu mahal, kurang memperhatikan kepentingan korban kejahatan.
3. Aliran neoklasik dipandang negara sangat manusiawi dan menggambarkan pertimbangan kepentingan secara proporsional. Karakteristiknya sebagai berikut: Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan, *daad-daderstrafrecht*, menggalkan *expert testimony*/kesaksian ahli, pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pidana, pengembangan *teintrac-system*, perpaduan antara *justice model* dari perlindungan terhadap hak-hak terdakwa-terpidana termasuk pengembangan *non-institutional treatment*, de-kriminalisasi dan depenalisasi.

Terkait dengan kepentingan korban yang harus diperhatikan dalam persoalan pokok pidana seperti diatas, dapat dikemukakan pendapat Muladi bahwa model peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia mengacu kepada *daad-daderstrafrecht* atau model keseimbangan kepentingan yang dipili dari aliran neoklasik. model ini disebut sebagai model realistik yang memperhatikan kepentingan yang harus

dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan pelaku korban kejahatan.

Dalam rancangan KUHP Baru telah diakomodasi perhatian terhadap kepentingan korban, yakni dalam pasal 48 ke-9. Dalam pemidanaan hakim wajib mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.⁶ Namun dilain sisi, dengan berbagai beberapa pandangan jika para pakar pidana memberikan pendefinisian tentang kejahatan yang merupakan segala perbuatan yang menentang undang-undang dan aturan yang telah ditetapkan atau bisa dikatakan secara normatif. Beda halnya dengan melihat dari sudut pandang sosiologi yang memandang secara luas dan dinamis. Pandangan ahli hukum pidana dalam memberikan arti kejahatan belum cukup mengungkapkan makna *the perfect crime*. Dalam kondisi *poskriminalitas*, harus ada cara pandang atau pola pikir yang berubah. Makna kejahatan seharusnya tidak hanya ditafsirkan sebagai apa yang bertentangan dengan undang-undang saja.⁵

Dengan pemahaman sosiologis, kita akan dapat *mendekonstruksi* arti atau makna kejahatan yang sempurna. Pemahaman sosiologis akan mengantarkan kita menuju *poskriminalitas* dan sekaligus akan mempertemukan hukum dengan realitasnya. Hanya dalam realitas, hukum dapat dipahami, bukan lewat pasal-pasal yang terdapat dalam setiap perundang-undangan. Hukum dipahami dalam struktur

⁶ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, hal.132

masyarakat, yaitu hukum yang dijalankan sehari-hari. Dengan demikian, apabila kita ingin memahami hukum dalam realitasnya, kita harus keluar dari batas peraturan hukum dan mengamati praktek hukum sebagaimana dijalankan dalam masyarakat. Dengan begitu, dalam mengertikan kejahatan, tidak hanya terpatok pada undang-undang belaka karena ada kemungkinan *perfect crime* adalah undang-undang yaitu sendiri atau para penguasa yang berlindung dibalik undang-undang tersebut.⁷

B. Pengertian Hukum Tindak Pidana

Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana dikenal dengan istilah *Staatsdaarheid*. Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering digunakan istilah delik, dan pembuatan undang-undang merumuskan suatu undang-undang dengan menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam pemberian ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dan sekaligus peristiwa-peristiwa konkret dalam lapangan hukum pidana. Jadi tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahnya dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari.⁸

⁷ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal.194

⁸ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), hal.1

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan oleh aturan hukum yang berupa larangan yang disertai adanya ancaman atau sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya. Oleh karena itu, hukum pidana menjadi hal yang sangat substansial untuk diketahui agar mampu menjadi alat pengontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sistem pemidanaan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit (formal), penjatuhan pidana berarti kewenangan menjatuhkan/mengenaikan sanksi pidana menurut undang-undang oleh pejabat yang berwenang (hakim). Sedangkan dalam arti luas (material), penjatuhan pidana merupakan suatu mata rantai proses tindakan hukum dari yang berwenang, mulai dari proses penyidikan, penuntutan, sampai pada putusan pidana dijatuhkan oleh pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana pidana. Hal ini merupakan suatu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral. Keseluruhan sistem, proses, kewenangan penegakan hukum pidana itupun harus terwujud dalam suatu kesatuan kebijakan legislatif yang integral. Kebijakan atas penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sudarto, ada tiga arti kebijakan kriminal, yaitu:

1. Dalam arti sempit, yaitu keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.

2. Dalam arti luas, yaitu merupakan keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Dalam arti paling luas, yaitu merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral masyarakat.⁹

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata didalam masyarakat terjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.¹⁰

Dengan hadirnya beberapa anggapan dan teori perihal tindak pidana ataupun perbuatan pidana, maka erat kaitannya dengan judul yang diangkat oleh penulis yaitu “Perlindungan Hukum Tindak Pidana Pelaku Pencurian Sebagai Korban Kekerasan Bersama-Sama Oleh Masyarakat.” Oleh karena itu, penulis harus kembali menelaah nilai-nilai dasar dalam hukum. Ini dikarenakan adanya antinomi antara kepastian dan keadilan.

⁹ Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, hal.11

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hal.3

Memandang kepastian (hukum) dan keadilan, seperti memandang dua sisi mata uang, karena keduanya harus ada, jika keadaan yang damai hendak dicapai. Sebuah keadilan tidak dapat digapai, apabila kepastian tidak dipenuhi, karena subjek hukum tertentu dapat dihukum tanpa memerhatikan terlebih dahulu, apakah tindakan yang dianggap sebagai suatu pelanggaran atau kejahatan, memang merupakan suatu delik. Dengan kata lain apakah sebelumnya sudah dipastikan terlebih dahulu, bahwa tindakan pelanggaran atau kejahatan itu merupakan rumusan delik ? Jika hal tersebut belum dirumuskan, maka penghukuman terhadap tindak pelanggaran atau kejahatan dapat dikategorikan sebagai kesewenang-wenangan, yang pada prinsipnya, menghilangkan nilai keadilan.¹¹

Polri sebagai alat negara penegak hukum harus berubah secara dinamis dalam menghadapi segala perkembangan dan tuntutan masyarakat, dengan memiliki kemampuan pengetahuan yang memadai, teknologi dan informasi yang dapat mengakses dengan cepat, karena adanya tuntutan tersebut, Polri harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan dapat membuktikan diri sebagai salah satu alat negara penegak hukum yang profesional dan mandiri.¹²

Hukum sebagai suatu perangkat norma-norma, yang mendapatkan pengakuan dalam masyarakat. Dalam bentuk tertulis maupun kebiasaan yang sudah

¹¹ E. Fernando M, Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta: Kompas, 2007), hal.101

¹² Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang, 2016), hal.79

rutin dan dipandang sebagai suatu yang baik. Dengan berbagai jenis ancamannya, serta stelsel sanksi telah juga diakui sebagai jalan yang benar dan adil. Sehingga hukum sebagai jalan tengah yang adil, dan bukan jalan kekuasaan yang sarat dengan lompatan-lompatan untuk kepentingan yang sangat subjektif. Hukum merupakan alat manusia yang sarat dengan nilai, karena itu dapat diketahui penyebab utama hukum ditaati ialah karena anggota-anggota kelompok mempercayai nilai-nilai yang dinyatakan hukum dan mewujudkannya lewat perilaku. Ketaatan seseorang kepada peraturan datang dari kesanggupan untuk menyatakan tujuan-tujuan bersama, sehingga orang dapat berpartisipasi didalamnya, bukan dari ancaman-ancaman kesalahan untuk menjamin tegaknya peraturan.¹³

C. Pengertian Kejahatan dan Teori-Teori Kejahatan

Manusia sudah mengenal kejahatan sejak generasi pertama manusia diturunkan kebumi. Didalam kitab-kitab suci umat beragama disebutkan bahwa kejahatan pertama kali dilakukan oleh anak-anak Nabi Adam ketika dijodohkan tidak sesuai dengan kehendak masing-masing pihak. Walaupun pada saat itu belum ada masyarakat, karena hanya ada Nabi Adam beserta keluarganya, namun pembunuhan dilarang oleh agama, dan karena agama merupakan tuntutan perilaku manusia maka hukum agama adalah hukum yang diikuti manusia, sehingga melanggar perintah dan larangan hukum agama sama dengan melanggar hukum dan hal tersebut sama dengan kejahatan.

¹³ Syaiful Bakhri, *Nutrisi Keilmuan Dalam Pusaran Ilmu Hukum Pidana*, (Jakarta Selatan: Kreasi Total Media, 2015), hal.35

Kejahatan merupakan problematik yang membayangi manusia. Kejahatan telah menjadi fenomena yang universal, artinya tidak ada masyarakat tanpa adanya kejahatan. Pada mulanya kejahatan disebabkan faktor kemiskinan. Dengan demikian, dalam masyarakat yang mengalami kekurangan sumber daya alam, kejahatan akan marak di masyarakat itu. Akan tetapi beberapa waktu kemudian, kejahatan disebabkan oleh kemakmuran.

Kejahatan selalu mengalami perubahan dan pergeseran. Elastisitas pengertian kejahatan salah satunya ditemukan dalam bidang hukum adat sebagaimana digambarkan oleh Soepomo bahwa suatu peraturan mengenai tingkah laku manusia (*rule of behavior*) pada suatu waktu mendapat sifat hukum, pada ketika petugas hukum yang bersangkutan mempertahankannya terhadap orang yang melanggar peraturan itu, atau ketika petugas hukum bertindak untuk mencegah terjadinya pelanggaran peraturan. Selanjutnya dikemukakan oleh Soepomo bahwa tiap-tiap peraturan hukum adat adalah timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, akan tetapi kemudian akan lenyap dengan adanya perubahan perasaan keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan. Begitu seterusnya keadaannya seperti ombak dipesisir samudera.¹⁴

Sebagaimana sebuah perbuatan manusia, Donald R. Taft menyatakan, bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Dengan demikian, definisi atau pengertian kejahatan sebagaimana

¹⁴ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, hal. 2

dikemukakan diatas, lebih menekankan pada aspek formal bahwa suatu kejahatan harus dirumuskan melalui undang-undang dan diancam dengan pidana. Apabila suatu perbuatan tidak memenuhi kriteria diatas, maka tidak dapat disebut kejahatan dalam pengertian hukum.¹⁵

D. Pengertian Kekerasan Bersama-Sama

Kejahatan kekerasan bersama-sama adalah suatu masalah yang senantiasa muncul ditengah masyarakat. Masalah tersebut muncul dan berkembang dan membawa akibat tersendiri sepanjang masa. Sehingga membutuhkan perhatian khusus untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Definisi kejahatan dari sudut pandang hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dan sebagai akibatnya akan dikenai sanksi. Dan dalam hal ini kejahatan kekerasan bersama-sama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat 1 yang berbunyi “Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.” Oleh karena itu perbuatan kekerasan bersama-sama dilarang untuk dilakukan.

Dalam berbagai literatur, mengapa kemudian perbuatan kekerasan bersama-sama dianggap perlu dilakukan adalah karena faktor pandangan sosiologis sebagian masyarakat yang merasa perbuatan tersebut memang harus dilakukan. Disini suatu

¹⁵ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, hal. 12

perbuatan meskipun belum dinyatakan undang-undang sebagai perbuatan pidana, tetapi bagi masyarakat telah dianggap perbuatan yang pantang untuk dilakukan. Oleh karena itu, apabila dilakukan akan mendapatkan sanksi sosial.

Secara sosiologis, kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat. Sebagaimana telah dikatakan diatas bahwa dalam perspektif sosial, kejahatan merupakan perilaku manusia yang melanggar norma-norma sosial pada umumnya yang dirasakan oleh warga masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan. Apakah perbuatan yang dimaksud telah ditetapkan melalui undang-undang atau belum, tidak merupakan persoalan bagi kelompok ini.¹⁶

Salah satu dari sekian bentuk kekerasan yang seringkali terjadi dimasyarakat dengan intensitasnya yang sudah sangat begitu memprihatinkan adalah munculnya kecenderungan didalam masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana dengan cara-cara ekstra legal, yaitu dengan cara melakukan penganiayaan dan atau pembunuhan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana. Kecenderungan masyarakat untuk melampiaskan rasa kemarahan dan kebenciannya terhadap pelaku tindak pidana ini rupanya terbatas

¹⁶ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, hal. 17

hanya pada tindak pidana konvensional atau “warungan” (blue-collar crimes) seperti pencurian, perampokan (pencurian dengan kekerasan), penipuan dan penggelapan, tetapi tidak pada tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan yang memiliki kedudukan atau status sosial terhormat seperti “kejahatan berdasi” atau “kejahatan kerah putih” (white collar crimes), yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan profesi dalam melakukan pekerjaannya (Bankir, Notaris, Advokat, dll), tindak pidana yang dilakukan oleh aparaturnegara (korupsi), tindak pidana korporasi. Padahal, tindak pidana dalam bentuk ini merupakan tindak pidana dengan tingkat kerugian dibidang ekonomi, dibidang kesehatan dan keselamatan jiwa, serta kerugian dibidang sosial dan moral yang luar biasa besarnya jika dibandingkan dengan tindak pidana konvensional atau warungan.¹⁷

Kekerasan yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat ini sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Kenyataan yang demikian menggambarkan bahwa hukum pada tataran empirik ternyata tidak diperlakukan sama untuk setiap orang.

Tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pada umumnya boleh dibilang sadis dan tidak kenal belas kasihan atau tidak manusiawi. Dikatakan tidak manusiawi, karena tindakan main hakim sendiri ini telah melibatkan sekian banyak orang yang melakukan pemukulan atau penganiayaan secara beramai-ramai terhadap

¹⁷ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016), hal.3

seseorang atau beberapa orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana. Pemukulan atau penganiayaan ini seringkali disertai dengan penggunaan benda-benda keras, tumpul dan tajam sebagai medianya. Selain mengalami luka-luka, dalam beberapa peristiwa pengadilan jalanan bahkan ada sekelompok orang yang kemudian membakar orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana hingga tewas. Korban tindakan main hakim sendiri bisa menimpa orang yang sebenarnya bukanlah pelaku tindak pidana sebagaimana dugaan mereka sebelumnya.¹⁸

Pembiaran terhadap tindakan yang dilakukan masyarakat seperti ini sama saja memberi kekuatan rasa tidak bersalah kepada para pelaku tindakan main hakim sendiri sekaligus menjadikannya sebagai perbuatan yang dibenarkan (justification), yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan masyarakat dalam menyelesaikan konflik atau masalah.

Pengadilan jalanan dalam arti melakukan tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian seringkali terjadi diberbagai daerah di Indonesia. Pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian pada umumnya bersifat spontan, tidak terorganisir dan tanpa pemimpin. Spontanitas dalam arti serempak seketika itu juga, sekelompok orang (massa) yang berada ditempat kejadian melakukan pemukulan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana

¹⁸ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, hal.5

pencurian, tidak ada yang mengorganisir dan tidak ada seorangpun diantara sekelompok orang (massa) tersebut yang berperan sebagai pemimpin. Spontanitas ini bisa juga dilihat ketika aksi pemukulan beramai-ramai ini sedang berlangsung, ada orang yang kebetulan lewat ditempat kejadian tiba-tiba berhenti dan kemudian ikut juga melakukan pemukulan.¹⁹



¹⁹ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, hal.20

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu kajian yang menelaah peraturan perundang-undangan terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas keberlakuannya dimasyarakat.
2. Dalam pembuatan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Gowa. Melihat cukup tingginya tingkat pengangguran dan tingginya kebutuhan hidup yang mengakibatkan banyaknya kasus kejahatan ataupun kriminal yang terjadi dikalangan masyarakat Gowa terkhusus kasus pencurian dan tindakan kekerasan secara bersama-sama. Oleh karena itu Kabupaten Gowa menjadi pilihan yang sangat baik untuk menunjang penelitian dari skripsi ini.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Yuridis
Pendekatan yuridis yaitu suatu cara atau metode yang digunakan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, yang memiliki korelasi dengan masalah yang diteliti. Peraturan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 170 ayat 1 tentang kekerasan bersama-sama.
2. Pendekatan Kasus (*case approach*)
Pendekatan kasus yaitu suatu pendekatan dengan menganalisis suatu kasus yang terjadi ditengah masyarakat yang terkait dengan judul skripsi ini dimana

informasi-informasi tersebut didapatkan dari pihak-pihak terkait yaitu masyarakat Kabupaten Gowa, Polres Gowa dan Pengadilan Negeri Sungguminasa Gowa.

C. Sumber Data

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Yaitu hasil wawancara dengan pelaku penganiayaan dan para aparat penegak hukum yang menangani kasus yang sedang diteliti.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, kaya ilmiah, internet, salinan putusan dan berbagai sumber lainnya yang terkait dan membangun penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dengan berbagai cara yaitu :

1. Wawancara yaitu tanya jawab lisan antara satu orang atau lebih secara langsung untuk mendapatkan informasi atas pengamatan dan pengalamannya berkaitan dengan hal yang sedang diteliti. Kegiatan wawancara ini berlangsung secara sistematis dari orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas dengan objek yang sedang diteliti. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda yaitu pengejar informasi yang disebut pewawancara atau *interviewer* dan yang memberikan memberikan informasi disebut sebagai informan, dan responden.
2. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini. Cara yang dilakukan untuk

menyediaan dokumen-dokumen yaitu dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan sebagainya. Hal ini dilakukan karena:

- a. Keterbatasan kemampuan dalam meneliti.
- b. Dapat mengsinergikan pendapat-pendapat para pendahulu dengan pemikiran peneliti. Sehingga menghasilkan pendapat baru yang lebih baik karena merupakan sebuah penyempurnaan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

1. Reduksi data, dimana teknik pengolahan data ini merupakan proses mengubah data kedalam pola, fokus, kategori atau pokok permasalahan tertentu.
2. Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.
3. Pengambilan keputusan ialah mencari kesimpulan atas data yang direduksi dan disajikan.

Adapun analisis data yang digunakan adalah analisis deskripsi kualitatif yaitu teknik pengolahan data yang dilakukan dengan mendeskripsikan/ membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Kekerasan Bersama-Sama Yang Di Lakukan Oleh Masyarakat Terhadap Pelaku Pencurian Di Kabupaten Gowa

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup saling ketergantungan satu dengan lainnya. Keberlangsungan hidup manusia tidak akan bisa bertahan tanpa bantuan dari manusia lainnya. Hal ini senada dengan ungkapan Aristoteles yang menyebut manusia sebagai *zoon politicon* yang berarti makhluk sosial. Dari keadaan ini, sebagai makhluk sosial manusia dituntut adanya hubungan satu sama lain yang dikenal sebagai interaksi sosial. Interaksi yang mengedepankan kepentingan bersama untuk keberlangsungan hidup bersama pula. Namun pertimbangan yang muncul adalah, yang menjadikan kehidupan sosial bertambah rumit dengan keadaan fitrah tiap manusia yang cenderung mempertahankan ego masing-masing. Kemampuan dan ketidakmampuan dalam diri manusia yang berbeda-beda menjadi dasar timbulnya rasa iri, dengki dan tamak. Hasil dari itu menjadikan keadaan dari suatu kelompok manusia terbagi dalam kelas-kelas atau strata sosial.

Dalam perkembangan kehidupan manusia selalu dibarengi dengan perkembangan aturan atau hukum. Sebagai dasarnya adalah merujuk pada ungkapan Marcus Tullius Cicero seorang ahli hukum kelahiran Roma “*Ubi societas ibi ius*” yang berarti dimana ada masyarakat disitu ada hukum, yang kemudian dijadikan sebagai asas hukum sampai pada masa modern saat ini. Kelahiran hukum yang ada saat ini tidak semata-merta hadir begitu saja. Namun didahului oleh yang namanya nilai-nilai kehidupan antara baik atau burukkah suatu perbuatan. Maksudnya adalah

standarisasi dari suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk tergantung dengan norma-norma yang berlaku pada masyarakat itu juga.

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan malam dan siang, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Kenyataannya, masalah kejahatan tidak dapat dihilangkan begitu saja kecuali dalam ungkapan utopia. Korban kejahatan tidak mengenal tempat, ruang dan waktu. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. tetapi tokoh kejahatan dapat saja menjadi mitos oleh para penjahat muda yang mengagumi tindakan kejahatan yang dilakukannya.

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tetap menjadi masalah besar dalam upaya penegakan hukum suatu negara hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya akan berguna untuk memulihkan kembali keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar tercipta suatu kepastian hukum. Namun makna kejahatan menjadi aktual sepanjang masa dari segi persepsi warga masyarakat dan politik kriminal dari kebijakan pembangunan hukum sebagai politik hukum oleh pemerintah yang berkuasa. Hal ini disebabkan adanya pandangan yang berbeda dalam menyikapi kejahatan sebagai suatu masalah sosial dan hukum.²⁰

1. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Sebagai sebuah daerah yang memiliki sejarah panjang dan terkenal atas adat dan budaya, kabupaten Gowa adalah salah satu daerah di Indonesia yang memiliki

²⁰ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Hirizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 35

norma-norma kemasyarakatan yang cukup banyak yang berlaku dimasyarakat. Norma-norma ini sifatnya tidak tertulis tetapi menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat untuk menaatinya. Kebiasaan yang turun temurun dan menjadi sebuah aturan, baik secara terpaksa maupun dengan penuh kesadaran. Lalu kemudian dipelihara oleh masyarakat itu sendiri. Dari aspek yuridis dilihat dari tingkat sanksinya. Bentuk konkret dari wujud perilaku adalah cara yang seragam dari sekumpulan manusia misalnya cara berjual beli, cara bagi waris, cara menikah dan sebagainya. Bila ada penyimpangan atau ada sanksi namun lemah.

Dari cara tersebut akan tercipta suatu kebiasaan, dan sanksi atas penyimpangannya agak kuat dibanding sanksi cara/usage. Kebiasaan yang berulang-ulang dalam masyarakat akan melahirkan standar kelakuan atau mores dimana sanksi atas penyimpangan sudah menjadi kuat. Dalam perkembangan standar kelakuan atau mores ini akan melahirkan custom yang terdiri dari adat istiadat dan hukum adat, dan sanksinyapun kuat sekali.²¹

Dengan memahami pola perilaku masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap penegakan sebuah aturan yang disebut sanksi dipandang juga sebagai sebuah fenomena atau gejala sosial primitif yang masih bertahan di era modern saat ini. Dimana metode dialektika dipakai yaitu cara kerja logika. Dalam materialisme historis dari Marx dan Existetalianisme. Obyek (*matter*) dan subyek (*mind*) ialah dialektis. Hal mengada menciptakan hal menyadari dan hal menyadari menciptakan hal mengada. Marx menjelaskan bagaimana hal mengada menciptakan hal menyadari (ekonomi mendasarkan hal rohani), sedangkan Berger menjelaskan bagaimana hal rohani menciptakan hal mengada. Harus dicatat bahwa sejak Marx istilah mengada

²¹ Utomo St. Laksanto, *Hukum Adat*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), hal.7

(*mattre, materia*) dimaksudkan sebagai mengada sosial (*sosial being*), bukan fosfor flegma atau atom-atom dari kaum materialis. Berger menjelaskan bagaimana realitas (hal mengada) diciptakan secara rohani yaitu secara sosial (*The sosial Construction of Reality*).²²

Suatu teori lain tentang hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial pernah pula dikemukakan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari pada solidaritas sosial dalam masyarakat. Menurut dia, maka didalam masyarakat terdapat dua macam solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical solidarity*) dan yang bersifat organis (*organic solidarity*). Solidaritas yang mekanis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang sederhana dan homogen, dimana ikatan dari pada para warganya didasarkan pada hubungan-hubungan pribadi serta tujuan yang sama. Solidaritas yang organis terdapat pada masyarakat-masyarakat yang heterogen dimana terdapat pembagian kerja yang kompleks. Ikatan dari masyarakat lebih banyak tergantung pada hubungan fungsional antara unsur-unsur yang dihasilkan oleh pembagian kerja. Pada masyarakat yang didasarkan pada solidaritas mekanis sistem hukumnya adalah hukum pidana yang bersifat represif. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tadi menghina keyakinan-keyakinan yang tertanam dengan kuatnya didalam masyarakat artinya, keyakinan-keyakinan yang telah mantap dalam masyarakat. Didalam masyarakat-masyarakat atas dasar solidaritas yang mekanis, para warganya bertindak atas dasar perasaan terhadap orang-orang yang melanggar kaidah-kaidah hukum, oleh karena apabila terjadi pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum semua warga masyarakat merasa dirinya terancam secara langsung. Akan

²² Brouwer M.A.W, *Psikologi Fenomenologis*, (Jakarta: PT Gramedia, 1984), hal.161

tetapi sebaliknya, pelanggaran atas kaidah-kaidah hukum tersebut memperkuat solidaritas didalam masyarakat.²³

Perbuatan kekerasan secara bersama-sama dari pengakuan Jumaris Dg. Rowa yang beraktivitas dipasar Minasa Maupa Kabupaten Gowa yang bekerja sebagai seorang pedagang bahwa tindakan tersebut berawal karena kekesalan. Dan yang menjadi dasar pikir kebanyakan orang-orang yang melakukan kekerasan adalah pelaku pencuri harus mendapatkan perbuatan keras agar tidak mengulangnya. Dan mereka yang melakukan penganiayaan kepada pelaku pencurian murni karena kesadaran diri sendiri ketika mendengarkan teriakan warga lain, ibarat lonceng peringatan untuk segera menyerang pungkasnya.²⁴

Dari pengakuan tersebut kita dapat memahami bahwa tindakan orang-orang yang melakukan kekerasan ataupun penganiayaan kepada pelaku pencurian merupakan bukan termasuk perbuatan yang tidak disengaja. Namun murni kesengejaan yang diresapi sebagai suatu keharusan untuk melakukan kekerasan ataupun menganiaya pelaku pencurian tersebut.

Bahkan dari hasil wawancara kepada seorang pemuda yang bernama Jihad Nur Ilham sangat merasa menyesal dan rugi ketika tidak mendapatkan kesempatan untuk memukuli pelaku pencuri yang tertangkap karena pihak kepolisian telah mengamankan pelaku pencuri tersebut.²⁵

²³ Soekanto Soerjono, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1980), hal.91

²⁴ Jumaris Dg.Rowa, (46 tahun), Pedagang Pasar Minasa Maupa Sungguminasa, *Wawancara*, Gowa, 28 Januari 2018.

²⁵ Jihad Nur Ilham, (24 tahun), Pemuda Pallangga, *Wawancara*, Gowa, 28 Januari 2018.

2. Perlindungan Hukum Pelaku Pencuri Sebagai Korban

Sebagaimana inti dari masalah ini yang menjadikan pelaku pencuri sebagai korban kekerasan dari sekelompok masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri. Maka ini merupakan perbuatan pidana baru atau jenis kejahatan untuk menanggulangi kejahatan. Yang tentu saja bisa ditindak lanjuti oleh pihak penegak hukum untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Dalam kerangka konstruksi sosial, maka keberadaan dan respon korban terhadap realitas kejahatan atau peristiwa viktimisasi terhadapnya merupakan suatu pengkonstruksian terhadap realitas kejahatan atau proses penimbunan korban dalam dimensi sosial yang melibatkan institusi dan kepentingan birokrasi didalamnya, serta konteks masyarakat sebagai suatu totalitas. Dengan demikian, realitas sosial terhadap perlindungan korban dalam masyarakat melalui peradilan pidana dikonstruksikan oleh formulasi maupun bekerjanya perundang-undangan oleh aparat penegak hukum.

Untuk memahami lebih jauh, perlu dikemukakan bentuk korban yang termasuk dalam muatan teori dari Stephen Schaffer, yaitu teori yang mencoba menelaah tanggungjawab fungsional dalam hubungan korban dengan pembuat kejahatan. Dalam hal ini dikemukakan pendapat Benjamin Mendelsohn dan Stephen Schaffer mengenai kualifikasi korban meliputi bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan. Mendelsohn mengemukakan keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan dapat dibedakan menjadi enam kategori berdasarkan derajat kesalahannya, yaitu:

1. Korban sama sekali tidak bersalah.
2. Seseorang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri.
3. Korban sama salahnya dengan pelaku.
4. Korban lebih bersalah daripada pelakunya.

5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah.
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi.²⁶

Dari pembagian kategori korban tersebut, maka posisi pelaku pencuri saat ini adalah pelaku pencuri menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. Namun sebagaimana hukum menjamin setiap orang oleh karenanya tetap saja orang-orang yang melakukan kekerasan ataupun penganiayaan kepada pelaku pencuri merupakan sebuah kejahatan pula. Sebagaimana hukum berfungsi untuk melindungi semua orang dari ancaman bahaya.

Perlindungan korban khususnya hak korban untuk memperoleh ganti rugi merupakan bagian integral dari hak asasi dibidang kesejahteraan dan jaminan sosial (*social security*). Hal inipun mendapat pengakuan dalam deklarasi universal hak asasi manusia, yaitu pasal 25 ayat 1 yang menyatakan:

Setiap orang berhak atas suatu standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya serta keluarganya, termasuk makanan, pakaian, rumah dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan hak atas keamanan pada masa menganggur, sakit, tidak mampu bekerja, menjanda, lanjut usia, atau kekurangan nafkah lainnya dalam keadaan diluar kekuasaannya.²⁷

Perlindungan korban dalam peradilan pidana menurut dalam ketentuan positif berusaha dikritik dari sisi pendekatan kritis bekerjanya perundang-undangan tersebut untuk diurgensikan dengan harapan citra hukum yang melindungi dan berkeadilan.

²⁶ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, hal.35

²⁷ James W. Nickel, *Hak Asasi Manusia-Making sence of Human Rights-Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), hal.267

Dalam KUHAP beberapa pasal yang mengatur hak korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana yaitu:

1. Hak menuntut penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana (pasal 98 – 101).
2. Hak atas pengembalian barang milik korban yang disita (pasal 46 ayat 1).
3. Hak pengajuan laporan atau pengaduan (pasal 108 ayat 1).
4. Hak mengajukan upaya hukum banding (pasal 233) dan kasasi (pasal 244).
5. Hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (pasal 168).
6. Hak untuk didampingi juru bahasa (pasal 177 ayat 1).
7. Hak untuk didampingi penerjemah (pasal 178 ayat 1).
8. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya sebagai saksi (pasal 229 ayat 1).²⁸

Berdasar ketentuan normatif diatas, dapat dikaji bahwa pembedaan atau stereotip perlindungan hak-hak korban masih disubordinasikan daripada pelaku. Hal ini tampak dalam beberapa hal.

Pertama, hak untuk mendapatkan bantuan hukum tidak diakomodasi bagi korban. Korban harus berhadapan dengan perilaku aparat penegak hukum dan pelaku sendiri. Diasumsikan bahwa korban seakan sudah diwakili oleh Negara dalam hal ini melalui aparat penegak hukumnya.

Kedua, hak lain lagi yang spesifik bagi korban dalam proses peradilan pidana yakni apabila dikedepankanacamata korban, maka korbanpun seharusnya memperoleh hak untuk memilih penyelesaian kasus yang dihadapinya. Berbagai penyelesaian hukum tidak menutup kemungkinan merupakan hasil konfirmasi antara penegak hukum dan pelaku tanpa melibatkan korban.

Ketiga, hak yang kurang diperhatikan dalam kebijakan formulasi terhadap korban adalah hak korban untuk mengetahui sejauh mana proses peradilan pidana, dalam arti hak untuk menuju jalan keadilan.

²⁸ C. Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, hal. 143

Keempat, hak korban untuk mendapat perlindungan atau hak korban untuk mendapat jaminan keamanan bagi korban merupakan hak korban yang harus diwadahi dalam ketentuan normatif.

Kelima, hak korban untuk memperoleh pendampingan atau asisten dalam mengurangi penderitaan yang dialaminya, baik secara moral psikologis maupun sosial.

3. Refleksi Keberlakuan Hukum Pidana

Telah diuraikan sebelumnya bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana itu sendiri. Bahkan, dapat dikatakan bahwa antara proses hukum yang adil dengan sistem peradilan pidana ibarat dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Alasannya, karena sistem peradilan pidana merupakan wadah dari proses hukum yang adil, sehingga tidak mungkin membicarakan proses hukum yang adil tanpa adanya sistem peradilan pidana. Demikian sebaliknya, proses hukum yang adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa.²⁹

Untuk itu, berikut beberapa aturan berkenaan dengan kesenjangan realitas hukum yang terjadi ditengah masyarakat :

1.) Pencurian Biasa

Pasal 362 KUHP, merumuskan:

Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu

²⁹ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2010), hal.7

dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

2.) Pencurian Ringan

Pasal 364 KUHP, merumuskan:

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No.4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.

3.) Pencurian Dengan Kekerasan

Pasal 365 KUHP, merumuskan:

(1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya.

(2) Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:

1e. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

2e. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

3e. Jika siteralah masuk ketempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

4e. Jiks perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.

(3) Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

(4) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.³⁰

Dari uraian aturan tentang pencurian tersebut sudah cukup jelas bahwa seseorang yang melakukan pencurian merupakan tindak pidana kejahatan. Dimana dalam melakukan aksinya tentu akan memberikan kerugian kepada korban pencurian dan orang lain yang berada pada sekitarnya. Hanya saja membenarkan perilaku masyarakat untuk menghakimi pelaku pencurian yang telah tertangkap tangan juga merupakan sebuah kesalahan. Walaupun kita sadari bersama bahwa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat kepada pelaku pencurian pada umumnya bersifat spontan, tidak terorganisir dan tanpa pemimpin. Spontanitas dalam arti secara serempak seketika itu juga, sekelompok orang yang berada ditempat kejadian melakukan pemukulan terhadap orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Spontanitas ini dapat dilihat ketika aksi pemukulan beramai-ramai ini

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeai, 1971), hal. 249

sedang berlangsung, ada orang yang kebetulan lewat ditempat kejadian tiba-tiba berhenti dan kemudian ikut juga melakukan pemukulan.

Sebagaimana yang menjadi fokus masalah adalah munculnya perbuatan pidana baru yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pelaku pencurian yang telah tertangkap oleh warga. Dimana perbuatan pidana tersebut jarang ada yang ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian atau aparat penegak hukum. Hal tersebut telah menimbulkan sebuah preseden kuat yang berkembang dan mengakar ditengah masyarakat bahwa melakukan kekerasan kepada pelaku pencurian merupakan perbuatan yang benar.

4.) Kekerasan Secara Bersama-sama

Pasal 170 KUHP, merumuskan:

(1) Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah dihukum:

1e. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

2e. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.

3e. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

(3) Pasal 89 tidak berlaku.³¹

Dengan aturan pasal 170 KUHP setiap orang yang melakukan kekerasan kepada pelaku pencurian bisa dipenjarakan, terlepas dari perbuatan pidana yang dilakukan sipencuri. Karena begitulah hukum menjamin setiap hak-hak warga negara. Begitu seringnya kekerasan terjadi, menjamur diberbagai wilayah di Indonesia terkhusus di Kabupaten Gowa sudah barang tentu menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan dan beradab.

Beragam bentuk kekerasan yang selama ini terjadi, oleh sebagaian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam bertindak. Lebih menyedihkan lagi karena dari sekian banyak kasus kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pencurian tidak pernah terungkap dengan tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kenyataan yang demikian merefleksikan bahwa hukum pada tataran empirik ternyata tidak diperlakukan sama untuk setiap orang, padahal sudah sangat jelas bahwa dalam negara yang berdasar atas hukum tidak mengenal adanya diskriminasi. Setiap orang ditempatkan pada kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) atau tidak seorangpun yang mempunyai kedudukan diatas hukum (*above of law*). Kenyataan ini sekaligus pula memperlihatkan adanya orang atau sekelompok orang yang seolah-olah mempunyai hak-hak istimewa (*special privilege*) sehingga

³¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal.146

pada gilirannya akan semakin memperpanjang daftar perilaku atau tindakan orang atau sekelompok orang yang sebenarnya melanggar hukum tetapi tidak tersentuh oleh hukum.³²

Mengurai fenomena sosial masyarakat Kabupaten Gowa yang masuk dalam tindakan main hakim sendiri sesuai pasal 170 KUHP ini memang sangat bertentangan dengan konsep keadilan dan kepastian hukum sebagaimana yang telah menjadi asumsi umum. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa kasus tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat kepada orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yang menjadi korbannya mengalami luka-luka, baik luka berat maupun luka ringan dan ada juga yang mati serta tindakan yang merusak barang dari terduga pelaku pencurian tersebut. Oleh karenanya tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tersebut kepada terduga pelaku pencurian merupakan sebuah kejahatan dan termasuk kepada perbuatan pidana baru yang dapat ditindak lanjuti oleh para penegak hukum dalam hal ini adalah pihak kepolisian.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum itu adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan menghakimi terduga pelaku pencurian ini akan terus berlangsung tanpa ada rasa bersalah yang kemudian hadir ditengah masyarakat karena adanya pembiaran. Sebagaimana ketidakadilan merupakan bentuk pertama dari kekerasan yang akan mendapatkan perlawanan, lalu kemudian menghasilkan ketidakadilan yang kedua lalu begitu seterusnya.

³² Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, hal.2

Dalam konteks faktor penyebab kekerasan, Theda Skocpol mengemukakan bahwa secara teoritik setidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai faktor penyebab terjadinya kekerasan kolektif, yaitu inherensi (*inherency*) dan kontingensi (*contingency*), yaitu faktor yang ada didalam diri manusia itu sendiri (internal) dan faktor yang ada diluar diri manusia (eksternal).

Kekerasan merupakan suatu yang inheren pada diri manusia, sehingga manusia mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Potensi ini tidak bisa dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat dicegah agar kekerasan tidak teraktualisasi atau terminimalisasi. Oleh karenanya pandangan inheren beranggapan bahwa kekerasan pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kehendak dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sedangkan pandangan kontingensi berpendapat bahwa kekerasan merupakan hasil dari kondisi struktural yang melingkupi kehidupan manusia seperti nilai, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

Pada dasarnya manusia melakukan kekerasan karena faktor kondisi yang ada diluar dirinya, sehingga terjadinya kekerasan dipandang sebagai hal yang tidak wajar, yaitu suatu tindakan yang dipengaruhi oleh suatu kondisi struktural diluar diri manusia yang mengandung unsur kebetulan.

Dalam konteks pandangan kontingensi terdapat satu teori yang mengemukakan tentang sebab terjadinya kekerasan kolektif, yaitu teori deprivasi relatif (*relative deprivation*). Teori ini menjelaskan bahwa kekerasan terjadi karena adanya desakan dari kondisi struktural yang melingkupinya, dimana terjadi adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan (*value of expectation*) berbeda dengan

kemampuan yang dimiliki untuk mencapai harapa itu (*value of capabilities*). Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan frustasi pada diri seseorang atau masyarakat, yang dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan kekerasan.³³ Namun dilain sisi perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat mengandung unsur politik kriminal. Dimana politik kriminal merupakan usaha yang rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Penanggulangan dilakukan dengan menggunakan pidana sebagai sarana dan tanpa menggunakan pidana. Hukum pidana dapat dipandang sebagai sarana kontrol sosial, khususnya dalam menanggulangi kejahatan. Dimana politik kriminal dalam arti sempit yaitu segala usaha untuk menanggulangi kejahatan. Dan politik kriminal dalam arti luas meliputi usaha yang dilakukan melalui pembuatan undang-undang dan tindakan dari badan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma pokok yang dianut oleh masyarakat.³⁴

Jika perbuatan masyarakat yang melakukan kekerasan secara bersama-sama berdalih untuk membenarkan perbuatan tersebut dengan menghakimi terduga pelaku pencurian dengan upaya bela paksa untuk membenarkan perbuatan masyarakat. Sebagaimana yang dimaksud pasal 49 KUHP: (1) Barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harata benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum. (2) Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang

³³ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, hal.22

³⁴ R. Sudarto, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Bina Cipta, 1980), hal.35

dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.³⁵ Maka ini menjadi pertimbangan sendiri, jika si pencuri tersebut telah berada dalam posisi tidak lagi mengancam siapapun maka tidak ada satu orang pun yang kembali berhak untuk melakukan kekerasan kepada terduga pelaku pencurian tersebut. Apalagi sasaran kekerasan tidak berhenti kepada terduga pelaku pencurian, tetapi kepada kendaraan atau barang bawaan juga baik dengan merusak atau membakarnya.

B. Langkah-langkah yang ditempuh oleh penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan secara bersama-sama terhadap pelaku pencuri

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota masyarakat. Artinya, setiap perubahan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Hukum merupakan rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam sosial masyarakat. Sebagai negara hukum terdapat hal penting dalam komitmen dan penghargaan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti yang termasuk dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.”³⁶

³⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal. 64

³⁶ Sekretariat jendral MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: MPR RI, 2015), hal. 14

Dalam pelaksanaan penegakan hukum seringkali diwarnai dengan hal-hal yang bertolak belakang dengan prinsip-prinsip UUD tersebut, seperti penganiayaan terhadap tersangka untuk mengejar pengakuan, rekayasa perkara, pemerasan, pengutan liar, intimidasi dan sebagainya. Selain itu dari pihak korban juga merasakan terabaikan akan hak-haknya yang berlaku secara hukum tetapi tidak dijalankan dalam proses hukum yang berlaku, seperti dakwaannya yang berkekuatan hukum lemah, juga tidak mengetahui perkembangan dalam proses penanganan dalam suatu perkara, tuntutan ringan, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lain.

Terhadap hak-hak tersangka atau terdakwa lebih populer diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan perundang-undangan lain yang terkait, bahkan juga di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang apabila diamati dalam KUHP tersebut lebih banyak mengatur hak-hak tersangka dan terdakwa. Untuk hak-hak korban (*Victim*) yang dimana pengaturan hukumnya tidak secara tegas dan tidak sebanyak hak-hak tersangka atau terdakwa dalam pelaku tindak pidana pencurian. Dalam hal menentukan suatu perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan salah satunya menggunakan kebijakan pidana.³⁷

Dengan landasan tersebut diatas maka semua warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran dan kejahatan terhadap ketertiban umum harus tunduk pada aturan yang berlaku, dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian

³⁷ Teguh Prasetya, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, (Bandung: Nusa Media, 2013) hal.1

hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkeit*). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib, sebaliknya masyarakat membutuhkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. unsur yang ketiga adalah keadilan, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil, baik secara komutatif maupun secara distributif.³⁸

Kesungguhan untuk menciptakan hukum yang baik tentu dengan melihat cara kerja hukum yang ideal dalam kenyataan praktik yang seharusnya memenuhi standar yuridis normatif, artinya bahwa hukum harus bermuatan norma sosiologis, norma filosofis, norma yuridis formal maupun materiil, dimana sistem hukum bersifat memaksa dan mengharuskan, juga secara empiris memberikan gambaran praktik hukum yang realistis, aktual dan faktual. Khususnya menyangkut penegakan hukum bagi pihak kepelisian dan institusi pengadilan dalam mencari fakta dan memutuskan perkara.

1. Penegak hukum

Penegak hukum adalah mereka yang tergabung dalam sebuah badan atau institusi lembaga yang melakukan upaya proses tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman setiap masyarakat terhadap hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan sosial masyarakat dan bernegara. Hal tersebut

³⁸ Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, (Makassar: Mitra Wacana Media, 2014), hal. 69

memiliki landasan atau payung hukum yang mendasari segala tindakan-tindakan penegak hukum atau biasa juga disebut sebagai aparat penegak hukum.

Seperti Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan penegak hukum didasarkan pada ketentuan UU. No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia yang berfungsi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayom dan menjadi pelayan masyarakat.

Lalu personil kejaksaan yang bertugas sebagai pejabat struktural, fungsional maupun penuntut umum yang merupakan penegak hukum dibawah komando Jaksa Agung yang didasarkan pada ketentuan UU. No. 16 Tahun 2004.

Kemudian hakim menjalankan menjalankan fungsi penegakan hukum yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya, tempat para hakim menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum. Hal termaktub dalam UU. No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

Dan advokat atau pengacara yang juga berfungsi sebagai penegak hukum namun advokat berstatus sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dimana pengacara melakukan serangkaian upaya untuk melindungi hak-hak dari tersangka maupun terdakwa dan advokat diatur dalam UU. No. 18 Tahun 2003.

Penegak hukum yang dijelaskan tersebut adalah mereka yang berkepentingan untuk melakukan proses hukum terhadap persoalan kekerasan bersama-sama yang dilakukan masyarakat terhadap terduga pelaku pencurian.

Sebagaimana yang dimaksud adalah mereka yang berperan untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari sebuah hukum.

Untuk menciptakan hukum yang adil ada beberapa aspek yang sangat perlu diperhatikan. Yakni landasan mengapa hukum itu dibuat atau asas-asas yang mengikuti aturan yang ada. Seperti salah satu aspek terpenting yaitu adanya asas legalitas. Dimana asas legalitas merupakan jaminan bagi setiap orang tidak terkecuali kepada terduga, tersangka atau terdakwa, bahwa ia akan diperlakukan sama dalam kasus yang sama, termasuk adanya kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan adanya asas legalitas, setiap orang dapat mengetahui perbuatan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, sehingga segala akibat perbuatan yang akan dilakukan dapat diprediksi sebelumnya. Selain itu, asas legalitas akan berfungsi sebagai pedoman bagi penegak hukum dalam bertindak. Hal tersebut memberi jaminan bahwa yang berkuasa dalam suatu negara adalah hukum dan bukan orang.

Lalu aspek persamaan dihadapan hukum yang juga merupakan salah satu aspek penting dari proses hukum yang adil. Karena tanpa asas ini tidak mungkin proses hukum yang adil dapat ditegakkan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap warga negara, tak terkecuali tersangka ataupun terdakwa harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak.

Dan asas praduga tidak bersalah yang pada dasarnya merupakan manifestasi dari fungsi peradilan pidana modern yang melakukan pengambilalihan kekerasan atau

sikap balas dendam oleh suatu institusi yang ditunjuk oleh negara. Dengan demikian, semua pelanggaran hak yang dilakukan oleh seseorang harus diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.³⁹

2. Langkah preventif

Pengertian langkah preventif adalah sebuah tindakan yang diambil untuk mengurangi atau menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dimasa depan. Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan tentang kekerasan secara bersama-sama dilakukan oleh masyarakat terhadap terduga pelaku pencurian atau tindakan main hakim sendiri harus mampu dihilangkan.

Pihak kepolisian yang paling sangat berperan dalam upaya preventif ini dengan melakukan berbagai sosialisasi dan pengamanan di daerah-daerah yang dianggap sering terjadi tindak kriminal seperti terminal maupun pasar. Adanya sosialisasi yang dilakukan pihak kepolisian mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tindakan apa saja yang boleh dilakukan ketika mendapati sebuah tindakan kriminal. Seperti persoalan yang telah diungkapkan yaitu pencurian yang didapati jika telah menyerah dan tidak lagi dalam posisi mengancam maka pihak warga masyarakat tidak boleh untuk melakukan tindakan main hakim sendiri dengan memukuli ataupun merusak barang pelaku pencurian tersebut. Dengan itu hukum akan lebih berwibawa dan menciptakan masyarakat yang taat hukum.

Dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dalam upaya pencerdasan berpikir dan bertindak terhadap perbuatan pidana atau kriminal yang terjadi dihadapan mereka. Hadirnya tokoh-tokoh masyarakat dalam membantu mencegah sebuah perbuatan pidana baru yang dilakukan masyarakat adalah hal yang sangat baik

³⁹ H. Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, hal.38

dan cerdas dilakukan pihak kepolisian. Yang menjadi perhatian disini adalah bagaimana kemudian pihak kepolisian mampu memberikan citra yang baik kepada masyarakat tentang bagaimana hukum diterapkan. Yang berujung pada kepercayaan yang akan timbul di masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Karena dalam tindakan main hakim sendiri tersebut merupakan salah satu wujud dari ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum itu sendiri.

Upaya preventif sendiri sebenarnya sudah ada sebagaimana aturan itu muncul. Hukum pidana yang telah diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan salah satu dari sekian banyak hukum untuk bagaimana seharusnya setiap orang bertindak atau bertingkah laku, disertai dengan konsekuensi berupa pidana tertentu bagi setiap orang yang bertindak atau bertingkah laku tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang tersebut. Penanggulangan pengadilan jalanan dengan hukum pidana selain menghadapi kesulitan dalam aplikasinya, juga dapat dikatakan tidak akan efektif karena tidak menyentuh pada akar masalahnya. Artinya, pencegahan pengadilan jalanan harus dilakukan dari penyebab terjadinya pengadilan jalanan itu sendiri yang sudah barang tentu berada diluar jangkauan hukum pidana. Hal ini berarti pula penanggulangan pengadilan jalanan harus lebih mengutamakan pencegahan tanpa pidana, yaitu menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya pengadilan jalanan, seperti kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan pengadilan jalanan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah peningkatan intensitas kejahatan pencurian. Peningkatan

pencurian ini tidak hanya menyangkut jumlah angka pencurian melainkan juga dalam hal jenis pencuriannya, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor. Yang kedua adalah inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus pencurian. Inkonsistensi ini berhubungan dengan peningkatan angka jumlah pencurian dengan ketidakmampuan polisi dalam mengungkapkan atau menyelesaikan laporan kasus pencurian tersebut. Hal ini terlihat dari kecilnya persentase jumlah laporan pencurian yang dapat diungkap atau diselesaikan oleh polisi dibandingkan dengan jumlah laporan pencurian itu sendiri. Dan yang terakhir adalah adanya respon negatif masyarakat korban pencurian terhadap hukum dan aparat penegak hukum. Respon negatif masyarakat korban pencurian ini timbul karena perilaku aparat penegak hukum ketika menerapkan hukum, terutama ketika menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat yang menjadi korban pencurian.

Dengan keadaan tersebut, maka yang menjadi prioritas dalam mencegah atau menanggulangi pengadilan jalanan ini pada dasarnya dapat dilakukan dengan melakukan optimalisasi upaya-upaya untuk menekan tingginya angka kejahatan pencurian, sesuai dengan tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. konsistensi pihak kepolisian dalam menyelesaikan setiap laporan pencurian sebagaimana tugas pokok seorang polisi yaitu penegak hukum. dan tentu harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dirugikan sebagaimana tugas pokok seorang polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

3. Langkah represif

Kebijakan hukum pidana yang digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan pada dasarnya merupakan kebijakan yang bersifat represif, yaitu menanggulangi kejahatan setelah kejahatan itu terjadi. Sebagaimana yang telah diuraikan, kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat atau pengadilan jalanan yang terjadi di wilayah Kabupaten Gowa menimbulkan akibat terhadap orang yang diduga sebagai pencuri, seperti menderita luka-luka, mati, serta rusaknya barang milik orang yang diduga sebagai pencuri. Walaupun pengadilan jalanan ini dilakukan secara spontan dan yang menjadi korbannya adalah pelaku kejahatan, namun perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang ini tidak dapat dibenarkan baik secara etika maupun hukum.

Seperti yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Gowa tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika mendengar adanya terjadi proses main hakim sendiri adalah yang pertama langsung mengunjungi tempat kejadian perkara dan langsung mengamankan terduga pelaku pencuri dan lokasi agar tidak lagi melakukan main hakim sendiri oleh masyarakat. Setelah sampai di lokasi sebagian personil kepolisian membawa pelaku pencurian ke rumah sakit dan sebagian personil lainnya mengamankan lokasi. Dalam hal menindak lanjuti proses hukum untuk masyarakat yang melakukan main hakim sendiri tidak pernah terjadi karena saksi-saksi yang minim atau tidak adanya yang bersedia untuk menjadi saksi. Dan dari sekian banyak kasus pelaku pencurian yang diamankan oleh pihak kepolisian hanya ada satu yang melaporkan keberatannya akibat dihakimi oleh masyarakat. Yaitu keluarga dari pelaku pencuri karena tidak menerima kematian yang dialami oleh terduga pencuri

tersebut. Hanya saja pihak kepolisian tidak bisa berbuat banyak karena minimnya saksi yang didapat dari lokasi kejadian.⁴⁰

Dalam konteks pengadilan jalanan ini, hukum pidana sebagaimana yang diformulasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada dasarnya tidak memuat ketentuan yang secara tegas mengatur mengenai pengadilan jalanan ini, karena bentuk perbuatan yang dilarang atau diharuskan disertai dengan ancaman pidananya, dalam KUHP tersebut hanya berisi rumusan-rumusan secara garis besarnya saja. Berdasarkan prinsip legalitas (*principle of legality*), pada hakikatnya hukum pidana menghendaki agar setiap perbuatan yang dilarang atau diharuskan itu terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan. Namun demikian, apabila disimak dari rumusan pasal-pasal yang terdapat didalam KUHP, pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan, yang walaupun tidak secara langsung mengatur mengenai pengadilan jalanan sebagai perbuatan yang dilarang, tetapi secara kasuistis beberapa ketentuan tersebut dapat digunakan oleh aparat penegak hukum sebagai dasar acuan untuk melakukan proses hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam melakukan pengadilan jalanan atau main hakim sendiri.

Berdasarkan perbuatan (*formil*) dan akibat perbuatan (*materiil*) yang timbul dari tindakan main hakim sendiri terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian yang kemudian menjadi korban, maka terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang dapat dikenakan terhadap para pelaku pengadilan jalanan. Yakni pasal 170 tentang kekerasan secara bersama-sama yang telah dijelaskan sebelumnya, juga melakukan pelanggaran terhadap hukum pidana sebagaimana yang dimaksud dalam

⁴⁰ Yusran Jabsur (45 tahun), Kasat Reskrim Polres Gowa, *Wawancara*, Gowa, 30 Januari 2018.

pasal 338 KUHP yang menyebutkan “barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Juga melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud pasal 351, 352 dan 354 KUHP, tentang penganiayaan. Juga melakukan pelanggaran hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam 406 KUHP, tentang pengrusakan barang.⁴¹

Semua ketentuan sebagaimana yang tersebut diatas menunjuk kepada perbuatan atau akibat perbuatan yang dilarang sebagai suatu kejahatan. Artinya pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku pencurian dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Berdasarkan hukum pidana yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), penyebutan istilah kejahatan menunjuk kepada perbuatan melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana yang diatur dalam buku III KUHP disebut sebagai pelanggaran.

Sebagaimana telah diuraikan, pengadilan jalanan berupa tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap pelaku kejahatan pencurian merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, yaitu dengan melanggar beberapa ketentuan sebagaimana yang telah dirumuskan didalam KUHP. Sama seperti kejahatan pada umumnya, proses hukum terhadap pelakunya dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap pra persidangan, lalu kemudian tahap persidangan dan tahap pasca persidangan. Proses hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam melakukan pengadilan jalanan atau main hakim sendiri

⁴¹ Fathul Achmadi Abby, *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*, hal.97

diawali oleh polisi melalui proses penyelidikan atau penyidikan. Dengan demikian, maka proses lebih lanjut ketahap penuntutan terhadap pelaku pengadilan jalanan ini berada pada kewenangan pihak kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana. Artinya, apakah proses hukum itu akan dilanjutkan ketahap penuntutan atau tidak, penentuannya sepenuhnya berada dibawah kewenangan pihak kepolisian.

Sehubungan dengan kewenangan kepolisian dalam melakukan penyidikan, polisilah sebenarnya dalam praktik yang dapat menentukan jahat atau tidaknya seseorang. Polisi sebagai aparat penegak hukum adalah yang pertama mengetahui dan menyelami secara langsung keadaan disekitar kejadian kemudian mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Besarnya kewenangan tersebut sering dikatakan bahwa salah tidaknya seorang tersangka itu tergantung pada pihak kepolisian karena polisi dapat menentukan apakah suatu perkara itu diteruskan kepengadilan atau tidak diteruskan kepengadilan dengan berbagai alasan.

Sebagai perbuatan melanggar hukum, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya, pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri termasuk dalam delik biasa bukan delik aduan. Artinya, pihak kepolisian sesuai dengan kapasitasnya sebagai penyelidik atau penyidik dalam melakukan proses hukum terhadap pelakunya pada dasarnya tidak memerlukan pengaduan dari korban atau tidak harus menunggu adanya adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu. Namun demikian, kewenangan yang ada pada polisi untuk mengawali proses hukum terhadap pelaku pengadilan jalanan ini tidak mudah untuk dilaksanakan.

Polisi dalam kewenangan yang ada padanya disatu sisi dan adanya ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku pengadilan jalanan disisi lain, ternyata kewenangan itu tidak pernah digunakan dan ketentuan pidana yang ada juga tidak pernah diaplikasikan. Dari sejumlah peristiwa yang terjadi di Kabupaten Gowa berkaitan tentang kasus pengadilan jalanan ini, tidak ada satupun dari peristiwa tersebut yang terhadap para pelakunya kemudian oleh polisi diproses secara hukum sampai ketahap penuntutan atau tidak ada seorangpun dari pelaku pengadilan jalanan ini yang kemudian dituntut dan dipidana melalui proses persidangan. Padahal dari beberapa peristiwa pengadilan jalanan ini, dimana pelaku pencuri yang menjadi korbannya ada yang mengalami luka berat dan ada juga yang meninggal dunia.

Perbedaan diantara beberapa peristiwa pengadilan jalanan atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat ini terletak pada akibat yang dialami korban terduga pelaku pencurian. Dan sejauhmana keterlibatan para pihak ketika melakukan pemukulan secara beramai-ramai terhadap orang yang diduga sebagai pelaku pencurian. Dalam beberapa kasus pengadilan jalanan, akibat yang dialami korban yakni pelaku pencuri berbeda antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya. Ada korban pengadilan jalanan yang mengalami luka ringan atau berat, dan ada juga yang mati. Demikian juga para pihak yang terlibat dalam melakukan pengadilan jalanan, keterlibatan antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya terdapat perbedaan. Selain ada yang menggunakan tangan kosong ketika melakukan pemukulan, ada juga yang diantaranya yang menginjak atau menendang, menggunakan benda keras baik tajam maupun tumpul, membakar dan lain-lain. Hal ini apabila dilihat dari segi pelaku. Padahal selain pelaku, terdapat sekian banyak orang lainnya yang berada ditempat kejadian.

Rumusan tindak pidana pada dasarnya berisi dua unsur, yaitu terdiri dari perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana atau yang biasa disebut dengan istilah “perbuatan nyata” (*actus reus*) disatu sisi, serta pertanggungjawaban pidana atau “sikap batin” (*mens rea*) dilain sisi. Sedangkan mengenai cara merumuskan tindak pidana, sementara ini terdapat perbedaan yang kemudian digolongkan kedalam aliran monistis dan dualistis. Aliran monistis merumuskan tindak pidana sebagai suatu kesatuan bulat yang tidak memisahkan antara perbuatan nyata (*actus reus*) dan sikap batin (*mens rea*), sedangkan aliran dualistis memisahkan secara tegas diantara keduanya.⁴²

Terlepas dari adanya perbedaan dalam merumuskan tindak pidana, maka kedua unsur tindak pidana tersebut, baik perbuatan nyata maupun sikap batin, sesungguhnya merupakan syarat untuk adanya pembedaan. Perbuatan nyata merupakan syarat objektif, sedangkan sikap batin merupakan syarat subjektif. Untuk dapat dipidanya orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, maka kedua syarat ini harus ada pada diri orang tersebut. Setiap ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan selalu memuat secara lengkap uraian mengenai unsur-unsur perbuatan yang dilarang atau diharuskan yang sekaligus juga merupakan bagian inti dari tindak pidana. Oleh karena itu, untuk bisa dikatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang maka perbuatan orang tersebut harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Sebagai yang telah diuraikan, untuk dapat dikatakan bahwa para pelaku pengadilan jalanan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 170 KUHP, maka perbuatan para pelaku tersebut harus memenuhi unsur-unsur yaitu yang pertama, dengan terang-terangan

⁴² Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hal. 66

dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, kemudian yang kedua, dengan sengaja merusak barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka-luka, luka berat, maut. Dengan demikian, siapapun untuk dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP tersebut, maka kesemua unsur yang merupakan bagian inti dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal ini haruslah dipenuhi dan sesuai dengan perbuatan nyata yang dilakukan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai siapa sesungguhnya yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana. Dalam konteks pengadilan jalanan. Dalam ilmu hukum pidana, siapa yang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dapat dibedakan antara pelaku menurut doktrin dan pelaku tindak pidana menurut KUHP. Pelaku tindak pidana menurut doktrin adalah mereka yang berbuat dalam arti melakukan perbuatan dengan memenuhi semua unsur ketentuan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Apabila menggunakan kategori pelaku tindak pidana menurut doktrin, maka akan terdapat orang yang luput dari pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana bisa dilakukan lebih dari seorang baik dengan kualitas yang sama maupun kualitas yang berbeda.⁴³

⁴³ Looby Logman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Jakarta: UPT Penerbitan Univ. Tarumanegara, 1995), hal.51

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab kekerasan yang selama ini terjadi oleh sebagian masyarakat seolah-olah sudah dianggap sebagai hal yang biasa sehingga kekerasan seringkali digunakan sebagai alat oleh seseorang atau sekelompok orang dengan alasan-alasan dan tujuan-tujuan tertentu dengan mengenyampingkan hukum yang seharusnya menjadi landasan utama dalam bertindak. Lebih menyedihkan lagi karena dari sekian banyak kasus kekerasan yang dilakukan masyarakat terhadap pelaku pencurian tidak pernah terungkap dengan tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekerasan merupakan suatu yang inheren pada diri manusia, sehingga manusia mempunyai potensi untuk melakukan tindak kekerasan dalam mencapai tujuan-tujuannya. Potensi ini tidak bisa dihilangkan sama sekali, melainkan hanya dapat dicegah agar kekerasan tidak teraktualisasi atau terminimalisasi. Oleh karenanya pandangan inheren beranggapan bahwa kekerasan pada dasarnya merupakan salah satu cara untuk mengekspresikan kehendak dan memperjuangkan kepentingan politiknya. Sedangkan pandangan kontingensi berpendapat bahwa

kekerasan merupakan hasil dari kondisi struktural yang melingkupi kehidupan manusia seperti nilai, sosial, politik, ekonomi dan lain-lain.

2. Untuk menindak perbuatan melanggar hukum, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHP sebagaimana disebutkan dalam uraian sebelumnya, pengadilan jalanan atau tindakan main hakim sendiri termasuk dalam delik biasa bukan delik aduan. Artinya, pihak kepolisian sesuai dengan kapasitasnya sebagai penyelidik atau penyidik dalam melakukan proses hukum terhadap pelakunya pada dasarnya tidak memerlukan pengaduan dari korban atau tidak harus menunggu adanya adanya laporan dari masyarakat terlebih dahulu. Namun demikian, kewenangan yang ada pada polisi untuk mengawasi proses hukum terhadap pelaku pengadilan jalanan ini tidak mudah untuk dilaksanakan karena terkendala oleh tidak adanya yang berkenan untuk menjadi saksi. Upaya pencegahan menimbulkan kekerasan secara bersama-sama harus dilakukan untuk memberikan ketertiban hukum yang jauh lebih efektif. Namun upaya represif harus tetap dilakukan agar memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan kekerasan secara bersama-sama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap terduga pelaku pencurian atau dengan sebutan pengadilan jalanan ini, maka diharapkan setiap penegak hukum yang dalam hal ini terkhusus kepada pihak kepolisian mampu bertindak jauh lebih efektif dan berlaku tegas kepada mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum tanpa terkecuali. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berada pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Dalam penerapan hukum seyogyanya harus bersifat universal apalagi berkaitan dengan kemampuan berkembangnya budaya hukum yang jauh lebih baik. Sebagai seorang warga negara yang baik haruslah tunduk pada aturan agar tercipta ketentraman dan kedamaian ditengah-tengah hubungan sosial kemasyarakatan. Upaya masyarakat untuk sebisa mungkin taat kepada setiap aturan akan dengan sendirinya menjaga setiap hak-hak masyarakat itu sendiri untuk tidak saling mengganggu. Oleh karenanya masyarakat yang sadar akan hukum tentu menjadi harapan kita semua.

DAFTAR PUSTAKA

- Abby,Fathul Achmadi. *Pengadilan Jalanan Dalam Dimensi Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2016.
- Anwar,Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grasindo, 2008.
- Butarbutar,Russel. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Bekasi: Gramata Publishing, 2016.
- Brouwer M.A.W, *Psikologi Fenomenologis*,Jakarta: PT Gramedia, 1984.
- Chazawi,Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Effendi,Tolib. *Dasar-Dasar Kriminologi “Ilmu Tentang Sebab-Sebab Kejahatan”*, Malang: Setara Press, 2017.
- Fromm, Erich, *Akar Kekerasan Analisis Sosio-Psikologis atas Watak Manusia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Indah S,C. Maya. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2014.
- Logman,Looby, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta: UPT Penerbitan Univ. Tarumanegara, 1995

- Manullang,E. Fernando M. Manulang. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Suroso,Imam. *Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: LaksBang, 2016.
- Soekanto,Soerjono, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: C.V. Rajawali, 1980.
- Soesilo,R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeai,1971
- Sulistia,Teguh dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Hirizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012
- Sudarto R., *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, 1980
- Sekretariat jendral MPR RI, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: MPR RI, 2015
- Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia*, Makassar: Mitra Wacana Media, 2014.
- Tahir,H. Heri, *Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2010.
- Utomo,St. Laksanto, *hukum adat*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017.
- W.Nickel,James, *Hak Asasi Manusia-Making sence of Human Rights-Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996

Zaidan,M. Ali. *Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.



RIWAYAT HIDUP



Rahmat Roofi J, S.H. Dilahirkan di kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 31 Desember 1995. Anak ketiga dari tiga bersaudara oleh pasangan Abd. Jabbar, S.E. dan Marwah Ilham. Menyelesaikan Studi Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum dari Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2018. Pengalaman organisasi sejak bermahasiswa adalah menjadi Ketua Umum Senat Mahkamah Pusat **MBH** (Mahasiswa Berpendidikan Hukum) Periode 2015-2016. Kemudian diamanahkan menjadi Sekertaris Umum **HMI** (Himpunan Mahasiswa Islam) Komisariat Syari'ah dan Hukum Cabang Gowa Raya Periode 2016-2017. Pendiri sekaligus Direktur **PPL** (Poros Pemuda Literasi) sejak tahun 2016. Anggota **KNPI** (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Gowa Bidang Hukum dan Ham Periode 2017-2021. Prinsip hidupnya adalah *Bersyukur dan ikhlas harus menjadi dasar pikir untuk mengarungi hidup.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R